

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi diprediksi dan dijelaskan oleh teori akuntansi positif. Membuat peraturan dapat menafsirkan dampak ekonomi dari berbagai kebijakan dan praktik akuntansi menggunakan teori akuntansi positif. Berdasarkan pengalaman yang dapat diuji secara empiris, teori akuntansi positif bertujuan untuk mendefinisikan apa dan bagaimana praktik akuntansi diterapkan. Proses penggunaan keterampilan akuntansi, pengetahuan, dan pemahaman bersama dengan aturan akuntansi terbaik untuk mengatasi keadaan masa depan yang spesifik juga dijelaskan oleh teori akuntansi positif. Pembuat kebijakan akuntansi dapat menggunakan pedoman yang ditawarkan oleh teori akuntansi positif untuk menilai dampak dari keputusan mereka.

Menurut Harahap (2011), pendekatan teori akuntansi positif dimulai dengan teori atau model ilmiah yang sudah ada atau diakui. Teori ini berfungsi sebagai landasan untuk tantangan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji perilaku aktual atau peristiwa yang bukan termasuk didalam teori. Lalu, sebuah hipotesis dibuat dalam menjelaskan fenomena ini, dan penelitian dilanjutkan dengan cara yang metodis dan terstruktur dengan membingkai masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan informasi, dan menguji statistik ilmiah.

Maka dapat dilihat apakah hipotesa yang dirumuskan diterima atau ditolak. Peneliti mengatakan metode ini lah yang dimasukan dalam ilmiah karena menjalankan aturan yang jelas dan data empiris yang obyektif dan model statistik matematik yang bersifat logik. Perkembangan teori positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif (Watts dan Zimmerman, 1986).

Lalu dikatakan bahwa awal pemikiran untuk menggambarkan teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan belum memberikan gambaran teoritis yang kuat. Terdapat tiga alasan dasar terjadinya pergerakan pendekatan normatif ke positif sabagai berikut (Watts dan Zimmerman, 1986 ):

- a. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasari pada premis atau asumsi yang tidak benar maka tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris.
- b. Pendekatan normatif hanya berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas.
- c. Pendekatan normatif tidak menekankan atau menaikkan terjadinya kuota sumber daya ekonomi secara baik di pasar modal. Tentu mengingat bahwa dalam skema perekonomian yang mendasari pada mekanisme pasar, informasi akuntansi memberikan gambaran untuk masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien.

Watts dan Zimmerman (1986) meluaskan pendekatan positif yang lebih berorientasi pada penelitian empiris dan menunjukkan berbagai teknik atau rumusan akuntansi yang saat ini dipergunakan atau mencari model baru yang akan digunakan kemudian hari.

Praktik akuntansi yang dilakukan melalui korporasi akan memiliki sebab. salah satu impian yang disukai adalah motivasi pajak. berdasarkan konsep harga politik, Watts dan Zimmerman (1978) berpendapat bahwa kelompok berpenghasilan tinggi dapat sangat rentan terhadap peralihan politik kekayaan dalam bentuk pedoman dan pedoman hukum. di mana dalam peraturan tersebut, dalam hal ini pihak berwenang, menghimbau agar semua korporasi membayar pajaknya berdasarkan keuntungan yang diperoleh korporasi tersebut. Hal ini membuat korporasi item karena mereka harus membayar pajak secara teratur ke kerajaan yang dapat mengakibatkan berkurangnya keuntungan. akibatnya, manajer organisasi akan cenderung memilih transfer pricing ke organisasi atau badan usaha mereka di negara lain agar pajak yang dibayarkan oleh badan usaha seminimal mungkin. Sejalan langsung dengan penurunan beban pajak yang dibayarkan dan pertumbuhan penjualan perusahaan yang bertahan lama.

## ***B. Transfer Pricing***

*Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 1979) mengartikan transfer pricing adalah harga yang disesuaikan dalam transaksi antara anggota grup didalam perusahaan multinasional yang mana harga transfer sudah

disesuaikan tersebut masih memungkinkan membelok dari nilai pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat membelok dari nilai pasar wajar karena keberadaan mereka dalam keadaan bebas untuk mengambil prinsip apapun yang cocok bagi korporasinya. Ketepatan Harga Transfer (*transfer pricing*) merupakan harga tepat dalam jual beli antara pihak yang memiliki Hubungan Istimewa menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2011.

Suandy (2016) pengertian *transfer pricing* dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat pejoratif. Pengertian yang sifatnya netral mengasumsikan bahwa *transfer pricing* adalah murni sebuah strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian yang bersifat pejoratif mengasumsikan *transfer pricing* salah satu bentuk untuk mengurangi beban pajak dengan cara, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya kecil. *Transfer pricing* dilakukan untuk berbagai permasalahan akuntansi manajemen dan pengendalian, dalam hal ini juga pengukuran kinerja dari tanggung jawab utama dan manajemen. Akuntan manajemen dan pengawas secara langsung berpengaruh dalam menetapkan *transfer pricing* yang jelas untuk tujuan non-pajak. Tetapi, untuk transaksi antara lintas intra-grup di perusahaan multinasional, kepatuhan untuk pajak telah menjadi pusat utama yang mencari lebih banyak perhatian dari manajemen perusahaan multinasional dibandingkan tujuan akuntansi manajemen secara langsung dalam praktik *transfer pricing* (Rossing, et al. 2017).

*Transfer pricing* merupakan sebagai instrumen internasional dari aturan dan manajemen pajak yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk tujuan meningkatkan keuntungan dan mengecilkan kewajiban pajak di negara mereka menjalankan satu atau lebih anak perusahaan, divisi ataupun afiliasi (Muhammadi, et al. 2016).

## C. Pajak

Sebuah negara memiliki banyak infrastruktur yang bertujuan untuk memfasilitasi warganya, dan untuk membangun infrastruktur ini dibutuhkan biaya, salah satu pemasukan biayanya ialah pajak. Pajak adalah kewajiban yang harus diberikan oleh warga negara kepada pemerintah yang secara terpaksa ataupun secara sukarela.

### a. Pengertian Pajak

Istilah pajak berdasarkan UU No. 16 tahun 2009 pasal 1 merupakan sebuah keharusan yang wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menggali sumber uang yang berasal dari dalam bangsa atau negara berupa pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai kemandirian bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi semua orang.

Kutipan dari beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut (Bhaktiar & Hidayat, 2020) :

1. Menurut Mr. Dr. Nj. Feldmann dalam buku *De over Heids middelen Van Indonesia* (terjemahan):  
Pajak dikenakan secara sepihak oleh dan terutang kepada pemberi kerja (sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh mereka pada umumnya) dan hanya digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.
2. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* (terjemahan):  
Pajak adalah pembayaran kepada pemerintah yang diharuskan oleh undang-undang dan yang dapat dikenakan tanpa efek merugikan yang terlihat pada tingkat individu untuk mendanai pengeluaran pemerintah.
3. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya yang berjudul *Pajak Azas Gotong Royong* menyatakan bahwa:
4. Menurut Prof. Dr. Rachmat. Soemitro, SH dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990:5) menyatakan:

Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan dalam bentuk produk atau uang yang dikumpulkan oleh pemilik usaha sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan untuk membayar produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Karena didasarkan pada istilah "sumbangan wajib", kata "dipaksa" tidak digunakan dalam istilah tersebut di atas. Aspek lain dari counter-performance menekankan perlunya pajak untuk mewujudkan *counter-performance*.

Pajak adalah pembayaran rakyat ke kas negara berdasarkan surat undang-undang (yang dapat ditegakkan) dan kegagalan mereka untuk memberikan layanan timbal balik, yang dapat ditunjukkan dengan jelas dan digunakan untuk menutupi pengeluaran publik.

Kita semua memiliki tujuan yang sama di antara banyak pakar pajak yang mendefinisikan pajak menggunakan berbagai frasa. Pajak dengan demikian merupakan pungutan yang dibayar rakyat kepada negara dan dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga rakyat dapat memperoleh manfaat secara lebih langsung. Dengan melakukan ini, para pakar pajak berharap dapat mengedukasi khalayak yang lebih luas tentang arti dan fungsi pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mentransfer uangnya ke Kas Negara karena alasan-alasan tersebut di atas. Dan korporasi bertanggung jawab atas kemajuan di bawah persyaratan ini, yang dapat dikenakan oleh otoritas pajak.

#### **b. Fungsi Pajak**

Beberapa yang telah kita ketahui bahwa pajak mempunyai beberapa fungsi yang seperti dijelaskan oleh (Yulianti, 2021) yaitu ;

##### **a. Fungsi Anggaran**

Pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen untuk menyetorkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Untuk mengumpulkan uang dari masyarakat umum untuk kas negara, pajak dipungut.

##### **b. Fungsi Mengatur (Regulerend)**

Pajak memiliki peran mengatur, yang menyiratkan mereka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi energi ekonomi dan masyarakat. Meskipun terkadang dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) memang tidak produktif dari sisi penerimaan kas negara, dalam hal ini

pemerintah menggunakan instrumen perpajakan untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sesuai dengan tujuan dan keinginan pemerintah.

### **c. Manfaat Pajak**

Pajak yang masuk kepada APBN negara adalah perwujudan kebersamaan warganegara untuk membiayai infrastruktur negara, dalam hal ini yang sudah dijelaskan oleh TmBooks (2016) yaitu :

1. Uang negara terutama berasal dari pajak.
2. Biaya personalia sampai dengan membagi biaya proyek pembangunan.
3. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
4. Dukungan finansial untuk memberikan rasa aman bagi setiap orang di masyarakat.
5. Mensubsidi produk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
6. Lunasi utang luar negeri negara.
7. Membantu UMKM dengan pendanaan dan pendampingan

Dengan pembenaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah tetapi juga kesejahteraan umum rakyat, sehingga pajak mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat.

### **d. Tarif Pajak**

Proporsi yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dikenal dengan tarif pajak (Cahyani & Noviari, 2019). Menerapkan keadilan sangat penting dalam hal pemungutan pajak. Keadilan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan berapa pajak yang harus dibayar menurut Waluyo (2017) (pajak yang harus dibayar).

#### **D. Pajak Tangguhan**

PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan menyatakan: Pajak dipungut dan dihitung sesuai dengan undang-undang perpajakan, dan keuntungan akuntansi dilihat berdasarkan aturan standar akuntansi. Perbandingan antara keduanya diterima secara luas hampir di semua sistem perpajakan negara-negara lain. Tempat perbandingan sebenarnya relatif sama dan sesuai, tetapi dengan jenis pengaturan yang berbeda. Selisih yang timbul antara lain terkait dengan perhitungan penyusutan, beban pajak, dan pendapatan yang dicatat sebagai kas. Namun, melihat dampaknya, pada akhirnya dapat dibagi menjadi perbedaan positif dan negatif. Ada perbedaan positif jika laba akuntansi lebih besar dari laba pajak dan sebaliknya. Perbedaan yang mencakup dampak pajak tangguhan pasca akuntansi adalah perbedaan temporer. Pendapatan kena pajak dan laba buku memiliki dasar hukum yang berbeda.

Pajak dikumpulkan dan ditentukan berdasarkan undang-undang perpajakan, dan laba akuntansi dihitung sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hampir semua peraturan perpajakan di banyak negara mengakui perbedaan antara keduanya. Jumlah kewajiban pajak yang diantisipasi yang dapat jatuh tempo sekarang atau di masa depan sebagai akibat dari pajak penghasilan yang belum dibayar yang pengakuannya telah ditunda dikenal sebagai pajak tangguhan. (Bhaktiar & Hidayat, 2020).

Menurut (Sajiwa, B., 2019) pajak tangguhan merupakan: "Dasar hukum untuk penghasilan kena pajak dan laba akuntansi berbeda. Pajak dipungut dan dihitung menggunakan ketentuan pajak, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan pedoman dalam standar akuntansi. Keduanya biasanya diakui berbeda di hampir semua undang-undang perpajakan di seluruh perbedaan ini memiliki metode pengaturan yang beragam meskipun posisinya sebenarnya cukup luas dan konsisten. Perhitungan penyusutan, pengaturan biaya dan pendapatan tertentu yang diakui secara tunai berdasarkan undang-undang perpajakan, pengaturan pendapatan yang tunduk pada aturan khusus berdasarkan undang-undang perpajakan, dan pengaturan untuk beberapa pengeluaran yang tidak diizinkan untuk dikurangkan dari penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang perpajakan adalah beberapa contoh di mana mungkin terdapat perbedaan.

Menurut Zain (2008,hlm.188)) pajak tangguhan terjadi akibat : “Perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer.” Menurut PSAK 46 dalam Zain (2008) mendefinisikan bahwa beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) merupakan jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deffered tax) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode.” (hlm.70)

Menurut Harmanto (2013) beban pajak tangguhan adalah biaya yang timbul sebagai akibat perbedaan singkat antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan pihak eksternal) dan laba kena pajak (laba yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak). Menurut Zain (2008), ada dua kategori utama yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan alasan perbedaan antara beban pajak penghasilan dan hutang pajak penghasilan:

1. Perbedaan Permanen atau Tetap

Pembatasan aturan dan peraturan perpajakan, beberapa penghasilan tidak dianggap kena pajak meskipun diakui sebagai penghasilan dalam dunia bisnis. Karena perbedaan ini, laba pajak dan laba komersial selalu berbeda.

2. Perbedaan Temporer atau Waktu

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan menurut penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya pada periode sekarang, misalnya:

- a. Metode penyusutan, saldo menurun dan garis lurus diakui di fiskal keuangan.
- b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan Rata-rata.
- c. Penyisihan piutang tak tertagih yang diakui secara fiskal, kecuali perusahaan pertambangan. Asuransi, Perbankan, dan Leasing

Menurut Wild et al. (2004) dalam Astutik dan Mildawati (2016), perhitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indikator mebobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva dan total asset. Hal ini dilakukan untuk



pembobotan beban pajak tangguhan dengan total asset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai yang dihitung dengan proposional

$$BPT = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan periode } t}{\text{Total Asset}_{t-1}}$$

#### a. Metode Pajak Tangguhan

Pengertian metode pajak tangguhan dijelaskan oleh (Sajiwa, B., 2019) adalah sebagai berikut: “Pendekatan pajak tangguhan cenderung menekankan pada seberapa banyak pajak yang dapat dihemat saat ini dalam menghitung pajak tangguhan. Tarif pajak yang digunakan untuk menentukan beban pajak adalah tarif pajak yang berlaku pada saat timbul perbedaan temporer. jumlah pajak tangguhan yang telah dihitung tidak akan berubah jika tarif pajak berubah atau jika pajak baru dikenakan pada triwulan berikutnya.

#### b. Pengukuran Aktiva dan Kewajiban Pajak Tangguhan

Secara hampir keseluruhan, ketentuan penilaian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan seperti yang tertulis didalam PSAK No. 46 dalam Zain (2008) dapat dinyatakan sebagai berikut ;

1. Kewajiban (aktiva) pajak kini untuk sebuah periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar pajak terhutang yang dihitung menggunakan tarif pajak berdasarkan pajak yang berlaku pada tanggal neraca.
2. Aktiva pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak yang nantinya berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau pada saat kewajiban dilunasi tarif pajak.
3. Aktiva pajak tangguhan dihitung dengan tarif pajak yang berlaku dan telah ditetapkan.
4. Apabila terjadi perbedaan pada tingkat laba fisik maka pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak rata-rata yang akan dikenakan pada laba fiskal pada saat perbedaan temporer.
5. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh didiskonto.

### c. Penyajian Pajak Tangguhan di Laporan Raba Rugi

Dalam menentukan pajak tangguhan wajib pajak harus mengetahui posisi penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi, yang biasanya dibagi menjadi dua dokumen pajak kini dan pajak tangguhan seperti yang dikemukakan oleh Diana (2014;320) merupakan sebagai berikut: "Biaya dan keuntungan pajak penghasilan ditunjukkan dalam laporan laba rugi, yang harus dibagi menjadi dua dokumen:

- 1) Pajak saat ini (pajak penghasilan terhutang)
- 2) Bagian pajak tangguhan (bagian yang diperhitungkan sebagai beban pajak, yang dihitung berdasarkan perbedaan temporer dikalikan tarif).

Mengalokasikan biaya dan keuntungan pajak untuk operasi yang sedang berjalan, operasi yang dihentikan, keadaan luar biasa, dampak keseluruhan dari perubahan akuntansi, dan penyesuaian dari periode lalu adalah tepat. Strategi ini menyerupai strategi alokasi pajak intraperiod. Selain itu, informasi berikut dapat diberikan untuk elemen kunci dari beban pajak yang dihasilkan dari operasi yang sedang berjalan: Beban/keuntungan pajak kini

1. Dipisahkan dari komponen lain yang dicatat, beban dan manfaat pajak tangguhan
2. Kredit Pajak Investasi
3. Dukungan pemerintah (pada tingkat tertentu merupakan pengurangan beban pajak penghasilan)
4. Keuntungan menutupi kerugian (juga menghasilkan pengurangan beban pajak penghasilan)
5. Beban pajak akibat pengurangan nilai goodwill entitas yang bersangkutan atau aset tidak berwujud lainnya serta modal disetor karena alokasi keuntungan pajak tertentu.
6. Perubahan aset atau kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan peraturan dan regulasi perpajakan atau perubahan status entitas yang bersangkutan.

Penghitungan semua beban pajak penghasilan didasarkan pada laba sebelum pajak (pendapatan sebelum pajak) dalam laporan keuangan komersial dikalikan dengan tarif awal tidak termasuk perbedaan tetap dengan ketentuan bahwa perusahaan juga diwajibkan untuk membuat rekonsiliasi (berdasarkan persentase

atau mata uang yang berlaku) antara beban pajak terkait dengan operasi yang dilanjutkan dengan pendapatan sebelum pajak dikalikan dengan tarif yang juga terkait dengan operasi yang dilanjutkan. Estimasi jumlah dan sifat rekonsiliasi yang signifikan harus diungkapkan. Dengan demikian berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa komponen yang berhubungan dengan beban pajak sehingga wajib pajak semakin mengerti letak atau posisi pajak tangguhan dalam laporan laba rugi.

#### **d. Penyajian Pajak Tangguhan Di Neraca**

Penyajian pajak tangguhan di neraca (Sajiwa, B., 2019) merupakan: Aset dan kewajiban pajak tangguhan, yang dikategorikan sebagai jumlah bersih saat ini dan jumlah tidak lancar bersih di neraca, dicatat sebagai akun pajak tangguhan. Berdasarkan hubungannya dengan kategorisasi aset atau liabilitas yang diungkapkan dalam laporan keuangan, setiap aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar.

Penurunan aset atau liabilitas yang dapat mengakibatkan variasi waktu pemulihan, atau sebaliknya, dipandang terkait. Klasifikasi sebagai giro atau bukan giro akan bergantung pada periode pemulihan yang diproyeksikan untuk perbedaan temporer ini jika terdapat pajak tangguhan yang tidak terkait dengan aset atau liabilitas tertentu:

1. Pemulihan dikategorikan sebagai giro jika diharapkan memakan waktu satu tahun atau kurang.
2. Pemulihan dikategorikan sebagai non-current account jika diperkirakan akan memakan waktu lebih dari satu tahun. Aset dan liabilitas pajak tangguhan pertama-tama saling hapus untuk menentukan apakah mereka akan menghasilkan (1) net current atau (2) net noncurrent dengan catatan antara giro dan noncurrent account. Hasil ini tidak saling eksklusif.

(Tampubolon, 2017) Secara khusus, akun-akun di neraca, yaitu saldo yang terdapat dalam aset dan kewajiban yang mengandung komponen koreksi fiskal sementara, seperti saldo aset dan kewajiban yang dapat disusutkan untuk utang

operasi, digunakan untuk menghitung aset pajak tangguhan bila menggunakan neraca. mendekati. Metodenya adalah sebagai berikut:

- 1) Aset pajak tangguhan akan tercipta jika nilai aset akuntansi lebih kecil dari nilai buku aset fiskal. Jumlahnya sama dengan nilai selisih dikali tarif pajak yang berlaku.
- 2) Kewajiban pajak tangguhan akan terjadi jika nilai aset akuntansi lebih tinggi dari nilai buku aset fiskal. Jumlahnya dihitung dengan mengalikan nilai selisihnya dengan tarif pajak yang berlaku.
- 3) Aktiva pajak tangguhan akan terjadi jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih tinggi dari nilai buku kewajiban fiskal. Jumlahnya dihitung dengan mengalikan nilai selisihnya dengan tarif pajak yang berlaku.
- 4) Kewajiban pajak tangguhan akan terjadi apabila nilai buku kewajiban akuntansi lebih rendah dari nilai buku kewajiban fiskal. Jumlah tersebut terdiri dari nilai selisih dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

#### **E. Pengertian *Tax To Book Ratio***

Tax to Book Ratio merupakan perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak (Taxable Income) terhadap laba akuntansi (Book Income). Menurut (Pajak et al., 2020) pada jurnalnya menyebutkan bahwa pengertian tax to book ratio yaitu: "Tax to book ratio merupakan rasio perbandingan antara laba akuntansi dan laba fiskal dimana laba akuntansi berdasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia sedangkan laba fiskal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia."

Menurut Lev dan Nissim (2004) dalam Christina et al (2010) bahwa tax to book ratio mampu memprediksikan pertumbuhan laba di masa depan. Semakin besar rasio (large to book ratio) yang dihasilkan, maka mengindikasikan laba masa depan yang lebih tinggi, namun tidak untuk periode saat ini. Berikut penjelasan Suparman (2011:13) tentang signifikansi tax-to-book ratio: adalah perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak terhadap Laba Akuntansi dimana penjelasan tentang rasio pajak terdapat atas catatan laporan keuangan. ((Pinayungan, 2019).

Menurut Suparman (2011) pengertian tax to book ratio adalah sebagai berikut: “Persepsi Rasio Pajak adalah perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak terhadap Laba Akuntansi dimana penjelasan tentang rasio pajak terdapat atas catatan laporan keuangan.”

$$\text{Tax to Book Ratio} = \frac{TL}{PTBL}$$

TL : Laba Fiskal atau Laba Kena Pajak

PTBL : Laba akuntansi atau Laba sebelum kena Pajak

#### a. Tujuan dan Kegunaan Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tujuan dari laporan laba rugi merupakan sebuah cara memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan selama kurun waktu yang ditentukan, yang membantu dalam menganalisis profitabilitas, efisiensi, dan laba atas investasi.

1. Berbagi informasi dan bertanggung jawab atas kinerja bisnis untuk jangka waktu tertentu. Cara paling penting untuk mengevaluasi kinerja entitas adalah dengan melihat keuntungan atau kerugiannya selama periode waktu tertentu. Pemangku Kepentingan (Stakeholder) sangat tertarik dengan keberhasilan dan kegagalan suatu entitas.
2. Memberikan informasi penting sebagai landasan penyusunan rencana masa yang akan datang Penyusunan rencana masa depan haruslah didasarkan atas catatan dan kinerja masa lalu. Disamping perencanaan kegiatan usaha, juga perencanaan atau analisis kemampuan arus kas dimasa yang akan datang sangat bergantung pada laporan laba rugi sebelumnya.
3. Mengantisipasi risiko yang mungkin timbul di masa depan

Laporan laba rugi komprehensif yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, diharapkan akan mampu memberikan informasi tentang resiko atau ancaman yang mungkin timbul terhadap usaha entitas serta kemampuannya dalam menghasilkan arus kas.” (hlm.180)

## b. Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal

Laba akuntansi adalah istilah lain yang dilakukan dalam standar akuntansi keuangan dan berarti laba atau rugi bersih dari selisih bersih periode sebelum dikurangi beban pajak. Di sisi lain, penghasilan kena pajak, yang disebut penghasilan kena pajak, adalah istilah pajak yang berarti laba atau rugi untuk suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan undang-undang perpajakan, dan merupakan dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Di tingkat korporat, manajemen menghitung laba perusahaan untuk dua tujuan: pelaporan keuangan dan pajak berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (General Accepted Accounting Principles/SAC).

Peraturan di Indonesia mewajibkan laba pajak dihitung berlandaskan aturan akuntansi yang mendasari untuk menghitung laba akuntansi, yaitu basis akrual, dan perusahaan diharuskan melakukan penyesuaian pajak tahunan, karena tidak perlu pembukuan berpasangan. Penyesuaian pajak akhir periode menghasilkan perbedaan antara penghasilan kena pajak dan laba akuntansi.

## F. Pengertian *Net Profit Margin*

*Net Profit Margin* merupakan rasio antara laba bersih (*net profit*) yaitu sesudah dikurangi dengan seluruh expenses termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan (Lukman Syamsuddin<sup>10</sup>, 2007:62). NPM (*Net Profit Margin*). (Dini & Indarti, 2012) dalam Rinati (2008:5) *Net Profit Margin* adalah perbandingan laba bersih dan penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar presentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Menurut (Tania & Nainggolan, 2021) NPM yang merupakan rasio profitabilitas adalah salah satu indikator penjualan terkait pengukuran margin laba. Besarnya NPM akan menyebabkan kinerja keuangan yang semakin membaik (Anggraeni & Elisa, 2020). NPM membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan (Winarno, 2019). Rumus NPM adalah:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

## G. Kinerja Keuangan

(Trianto et al., 2017) menyatakan bahwa: Kinerja dapat dipahami sebagai pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu yang menunjukkan tingkat kesehatannya. Sedangkan kinerja didefinisikan oleh Jumingan (2006:239) sebagai pencapaian yang dilakukan oleh usaha dalam kegiatan operasionalnya baik dari aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dan pengalokasian dana, aspek teknologi, maupun aspek berkaitan dengan sumber daya manusia. “ Untuk menentukan apakah suatu unit bisnis atau perusahaan berkualitas tinggi, yang paling dominan dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah unit bisnis atau perusahaan tersebut menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik.

Kinerja Keuangan mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis yang terkena dampak, neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012: 2). Kinerja keuangan menurut Jumingan (2009:239) adalah gambaran keadaan keuangan selama periode waktu tertentu, termasuk karakteristik perolehan dana dan pengalokasian dana, yang seringkali diukur dengan ukuran kecukupan modal, likuiditas, dan rentabilitas.

Kinerja keuangan adalah keberhasilan yang dicapai perusahaan dalam mengelola keuangannya untuk mencapai kinerja operasi yang unggul. Kinerja suatu perusahaan merupakan ukuran kinerja suatu perusahaan yang dapat menghasilkan laba, dan laba merupakan salah satu alat yang digunakan manajer.

**a. Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu (Rachmawati & Pinem, 2015). Menurut Sudana (2011) Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Hubungan antara profitabilitas perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hipotesis (premis dasar) yang mencerminkan pandangan bahwa daya tanggap sosial memerlukan gaya kepemimpinan. Profitabilitas menunjukkan baik atau tidaknya suatu perusahaan memiliki prospek masa depan yang baik, sehingga memiliki implikasi penting bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan alat analisis untuk mengevaluasinya.

**b. Return on Asset**

Profitabilitas dapat dihitung melalui banyak cara salah satunya ialah ROA, ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. *Return On Asset* (ROA) menunjukkan kembalian atau laba perusahaan yang dihasilkan dari aktifitas perusahaan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan. Semakin besar rasio ini maka profitabilitas perusahaan akan semakin baik. *Return on Assets* (ROA) menunjukkan tingkat pengembalian atau keuntungan usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang digunakan untuk menjalankan usaha tersebut. Semakin tinggi rasio ini, semakin menguntungkan perusahaan. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur ROA Van Horne dan Wachowicz (2005) antara lain:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada banyak cara untuk mengukur metrik profitabilitas, tetapi ROA yang umum digunakan. ROA adalah metrik luas yang mencerminkan pelaporan keuangan dan



mudah dihitung. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menggunakan ROA dalam perhitungan untuk penelitian ini.

## **A. Keterkaitan Antar Variabel**

### **1. Hubungan Antara Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan**

Ketika pajak tangguhan tinggi, kinerja Perusahaan ditingkatkan dengan perencanaan pajak yang lebih baik yang tercermin dalam laporan keuangannya antara pembukuan dan manfaat pajak. Hasil tersebut didukung oleh Christine Sanjaya (2016) yang menemukan bahwa pajak tangguhan memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Hasil tersebut didukung oleh Wati Putri Dewi (2015) yang menyatakan bahwa Pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herryssen Suhendra dan Djoko Wahyudi (2016) yang menyatakan bahwa Pajak tangguhan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi beban pajak tangguhan maka kinerja dari perusahaan akan meningkat karena adanya perencanaan pajak yang baik yang tercermin dalam laporan keuangan antara laba akuntansi dan laba fiskal.

### **2. Hubungan Antara *Tax To Book Ratio* Terhadap Kinerja Keuangan**

*Tax to book ratio* (Kosanke, 2019) menjelaskan tentang rasio *taxable income* dan *book income* yang disajikan pada laporan keuangan memberikan informasi tentang kemampuan meminimalkan beban pajak. Menurut Kevin Alice Planata (2016), *tax to book ratio* adalah hubungan yang terkait dengan kewajiban pajak tangguhan, dengan catatan bahwa dari total yang diterima perusahaan dari otoritas pajak ketika perusahaan tidak mampu merencanakan pajak yang sesuai dengan aturan pajak yang ada maka akan menurunkan laba. Disisi lain menurut Rhiaditha (2017) menjelaskan bahwa *tax to book ratio* sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Semakin besar *tax to book ratio* yang diperoleh maka perusahaan akan berusaha memperkecil pembayaran pajak dan akan meningkatkan kas untuk memberi kewajiban jangka panjang, perusahaan akan menyisihkan pembayaran pajak agar tidak beresiko dalam sebuah investor/kreditor

menjadi lebih tinggi sehingga tax to book ratio sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

### 3. Hubungan Antara *Net Profit Margin* Terhadap Kinerja Keuangan

*Net profit margin* (NPM) merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan (Kasmir:2016). Rasio ini mengukur rasio perusahaan menghasilkan pendapatan bersih terhadap total penjualan yang dicapainya. Semakin tinggi *Net Profit Margin* yang dicapai oleh perusahaan menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam menghasilkan laba bersihnya. Dengan demikian hubungan *Net Profit Margin* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

#### B. Hasil Penelitian yang Sesuai Sebagai Rujukan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

#### Hasil Penelitian Terdahulu

<b>Nama &amp; Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
(Joice, 2019)	PENGARUH PAJAK TANGGUHAN DAN TAX TO BOOK RATIO TERHADAP KINERJA KEUANGAN	Variabel indenpenden yang digunakan X1= Pajak Tangguhan X2= Tax To Book Ratio Y= Kinerja Keuangan	Terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak tangguhan terhadap kinerja keuangan, Tax To Book tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
(Herni Pujiati, 2021)	PENGARUH NET PROFIT MARGIN DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP KINERJA KEUANGAN	Variabel indenpenden yang digunakan X1= Net Profit Margin X2= Return On Assets	Net Profit Margin berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Secara simultan Net Profit Margin berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

		Y= Kinerja Keuangan	
(Saprudin1, ElisabetKristianti2, Glory Koeswardhana3, 2021)	PENGARUH PAJAK TANGGUHAN DAN <i>TAX TO BOOK RATIO</i> TERHADAP KINERJA KEUANGAN	Variabel indenpenden yang digunakan X1= Pajak Tangguhan X2= <i>Tax To Book Ratio</i> Y= Kinerja Keuangan	Pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, <i>Tax to book ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Pajak tangguhan dan <i>tax to book ratio</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
(Rai Artaningrum, 2020)	Gina PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN	Variabel indenpenden yang digunakan X1= Perencanaan Pajak X2= Pajak Tangguhan Y= Kinerja Keuangan	variabel pajak tangguhan yang dihitung dengan proksi BPTit memiliki pengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan, variabel perencanaan pajak dan pajak tangguhan memiliki pengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan
(Syafrida Hani1), Retno Asti Nadhira2), Irfan3), 2020)	PENGARUH <i>DEFERRED TAX</i> DAN <i>TAX TO BOOK RATIO</i> TERHADAP KINERJA KEUANGAN	Variabel indenpenden yang digunakan X1= <i>Defferede Tax</i> X2= <i>Tax To Ratio</i> Y = Kinerja Keuangan	Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh <i>deffered tax</i> dan <i>tax to book ratio</i> dalam mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur dengan ROE, <i>deffered tax</i> dan <i>tax to book ratio</i> memiliki pengaruh negatif terhadap ROE.
(Muji Wahyu Prasetyo, Wiwin Wahyuni), 2019)	PENGARUH PAJAK TANGGUHAN, <i>TAX TO BOOK RATIO</i> , <i>NET PROFIT MARGIN</i> DAN	X1 = Pajak Tangguhan X2 = <i>Tax To Book Ratio</i>	H1: Pajak tangguhan, <i>Tax to Book Ratio</i> , <i>Net Profit Margin</i> dan <i>Operating Assets Turnover</i> berpengaruh secara

	<p><i>OPERATING ASSETS TURNOVER</i> TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA</p>	<p><math>X3 = \frac{\text{Operating Assets Turnover}}{\text{Kinerja Perusahaan}}</math>  <math>Y = \text{Kinerja Perusahaan}</math></p>	<p>simultan terhadap Kinerja Perusahaan  H2: Pajak tangguhan berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Perusahaan  H3: <i>Tax to Book Ratio</i> berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Perusahaan</p>
<p>(Destri Stevani (Paul Sudjiman2) 2021)</p> <p>Syeba Sijabat1) Eduard</p>	<p>PENGARUH <i>DEFERRED TAX EXPENSE</i> DAN <i>TAX TO BOOK RATIO</i> TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PADA SUB SEKTOR PLASTIK DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2020</p>	<p><math>X1 = \frac{\text{Defferend Tax}}{\text{Kinerja Perusahaan}}</math>  <math>X2 = \text{Tax To Book Ratio}</math>  <math>Y = \text{Kinerja Perusahaan}</math></p>	<p><i>Deferred tax expense</i> tidak adanya pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur industri Sub-Sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, <i>Tax to book ratio</i> dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan pada perusahaan manufaktur Industri Sub-Sektor Plastik, Berdasarkan hasil uji secara simultan <i>Deferred tax expense</i> dan <i>Tax to Book Ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan pada perusahaan manufaktur industri Sub-Sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia</p>
<p>(Fransiscus Bhaktiar1) Vinny Stephanie Hidayat2 2020)</p>	<p>PENGARUH PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK</p>	<p><math>X1 = \text{Pajak Tangguhan}</math></p>	<p>Secara teoritis pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.</p>

	<p>TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN</p>	<p>X2 = Perencanaan Pajak Y = Kinerja Perusahaan</p>	<p>Untuk menguji hipotesis di atas, digunakan kriteria pengujian dua sisi adalah sebagai berikut:          Nilai Signifikansi <math>\leq</math> Taraf Signifikansi (<math>\alpha</math>): Ditolak          Nilai Signifikansi <math>&gt;</math> Taraf Signifikansi (<math>\alpha</math>): Diterima. Secara teoritis perencanaan pajak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.          Untuk menguji hipotesis di atas, digunakan kriteria pengujian dua sisi adalah sebagai berikut:          Nilai Signifikansi <math>\leq</math> Taraf Signifikansi (<math>\alpha</math>): Ditolak          Nilai Signifikansi <math>&gt;</math> Taraf Signifikansi (<math>\alpha</math>): Diterima</p>
<p>(Yogi Maulana Putra) 2019)</p>	<p>PENGARUH ASET PAJAK TANGGUHAN, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA</p>	<p>X1= Aset Pajak Tangguhan X2= Beban Pajak Tangguhan X3= Perencanaan Pajak Y= Manajemen Laba</p>	<p>Hasil dari hipotesis ini menyatakan bahwa Aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi hitung (0.012) &lt; taraf signifikan (0.05). Hasil dari hipotesis ini menyatakan bahwa Beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi hitung (0.023) &lt; taraf signifikan (0.05). Hasil dari hipotesis ini menyatakan bahwa Perencanaan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap</p>

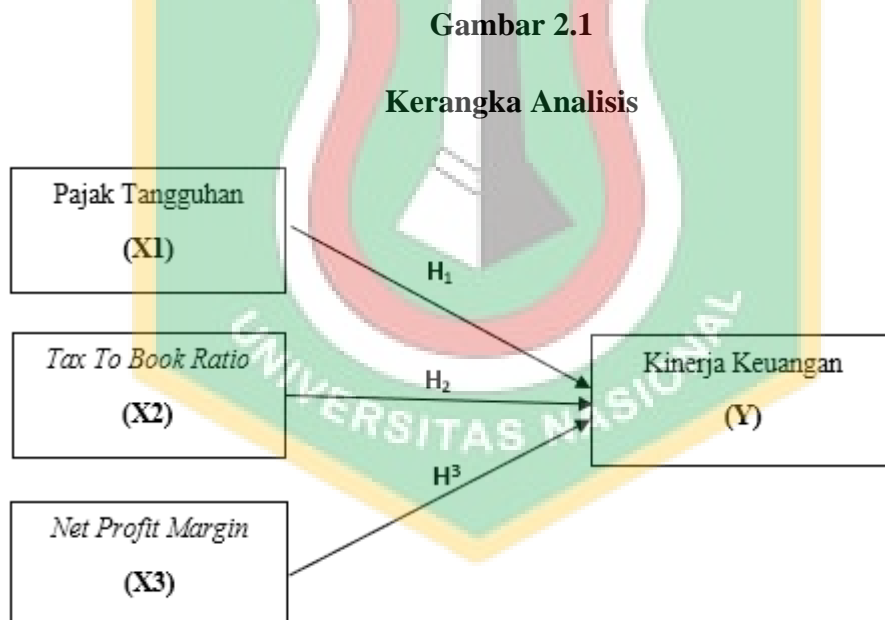
			manajemen laba. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi hitung (0.0792) > taraf signifikan (0.05).
--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh penelitian, 2022

### C. Kerangka Analisis

Model yang menjelaskan bagaimana teori terhubung ke elemen yang diketahui signifikan dalam masalah tertentu dikenal sebagai kerangka kerja analitis. Variabel penelitian independen dan dependen dapat dihubungkan dengan kerangka teori untuk analisis..

Pada penelitian ini terdapat 1 (satu) variabel terikat, 3 (tiga) variabel bebas. Variabel terikat (Y) Kinerja Keuangan, sedangkan variabel bebas yakni, Pajak Tangguhan (X1), *Tax To Book Ratio* (X2), dan *Net Profit Margin* (X3).



Sumber: Diolah oleh penelitian, 2023

H1 : Hubungan pajak tangguhan dengan kinerja keuangan.

H2 : Hubungan *tax to book ratio* dengan kinerja keuangan.

H3 : Hubungan *net profit margin* dengan kinerja keuangan.

## **E. Hipotesis Penelitian**

### **1. Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan PSAK No. 46 pajak tangguhan merupakan salah satu akun yang berpengaruh sebagai pajak di neraca, dan jumlah pajak tangguhan dapat hilang di masa depan karena perbedaan temporer antara akun akuntansi dan akun pajak yang diharapkan akan dikumpulkan pada periode tersebut. Laporan keuangan dapat menyesatkan pembaca jika dampak pajak untuk periode mendatang tidak dimasukkan dalam neraca dan laporan laba rugi komprehensif. Sebuah studi oleh Suardana (2014) menemukan bahwa pajak tangguhan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Suardana (2014) menulis dalam bukunya: Ketika perusahaan mampu melakukan manajemen pajak yang baik, dapat membantu untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dan juga mengindikasikan perlunya investor untuk mempertimbangkan pajak tangguhan dalam suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Semakin besar pajak tangguhan maka semakin baik kinerja perusahaan, adanya pajak tangguhan memungkinkan perusahaan untuk menanggukhan biaya yang akan digunakan untuk dana operasional perusahaan.

**H1= Pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.**

### **2. Pengaruh *Tax To Book Ratio* Terhadap Kinerja Perusahaan**

*Tax to book ratio* adalah perbandingan rasio penghasilan kena pajak terhadap laba akuntansi. Suatu perusahaan dapat dikatakan berkinerja baik jika selisih antara laba buku dan laba kena pajaknya kecil. Perbedaan ini terlihat pada rasio pajak terhadap nilai buku yang lebih rendah. Semakin besar perbedaan penghitungan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan fiskus maka akan melahirkan anggapan bahwa perusahaan tidak mampu merencanakan pajak sesuai dengan aturan yang ada.

Perbedaan inilah yang dapat mempengaruhi laba karena pajak ialah suatu beban yang dapat mengurangi laba suatu perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan yang baik akan menunjukkan perbedaan

penghitungan yang kecil sehingga anggapan yang akan muncul ialah perusahaan mampu untuk merencanakan pajak yang sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian sebelumnya mengenai *tax to book ratio* (Saprudin<sup>1</sup>, ElisabetKristianti<sup>2</sup>, Glory Koeswardhana<sup>3</sup>, 2021) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

**H2= *Tax To Book Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.**

### **3. Pengaruh *Net Profit Margin* Terhadap Kinerja Keuangan**

Herni Pujiati, Imelda Maulidina (2021), menyatakan *Net Profit Margin* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. *Net profit margin* atau marjin laba bersih yang ada dalam rasio profitabilitas untuk mengetahui dan mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mengukur laba bersih. Menurut Fahmi (2017), Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Dengan demikian, dari hal tersebut jika rasio *net profit margin* tinggi maka keuntungan yang diperoleh perusahaan juga akan tinggi. Apabila kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba atas penjualan semakin meningkat maka hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan yang akan diterima oleh para pemegang saham.

**H3= *Net Profit Margin* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.**